

Strategi Peningkatan Investasi Pada Provinsi Kalimantan Utara Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 2012

Juniawan Mandala Putra¹, Erlina Puspitaloka Mahadewi²

Program Doktor Pascasarjana Universitas Mercubuana

Juniawan.mandala@student.mercubuana.ac.id

erlina.puspitaloka@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

In line with current economic growth, Kalimantan Utara, as a new province in Indonesia, was set on October 25, 2012 by the DPR, which made Kalimantan Utara the youngest province in Indonesia and was independent, this decree was adopted by the central government so that the new province can reduce poverty and unemployment in the Kalimantan region and aims to reduce migration from villages to cities around Kalimantan Utara. The purpose of this study is to analyze the investment growth strategy in Kalimantan Utara after the division of the region and its impact on the economic growth of the people of Kalimantan Utara. The method in this study is a literature review with a descriptive approach and secondary data from the Central Statistics Bureau (BPS) of Kalimantan Utara. It can be concluded that: (1) the presence of investors in Kalimantan Utara and making employment opportunities for the surrounding community can reduce unemployment, (2) The needs of the development itself include improvements to infrastructure, health, and education which have an impact on the progress of the government in planning policies that have the potential to eradicate poverty.

Keywords: strategy, increased investment, Kalimantan Utara, regional expansion

ABSTRAK

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi saat ini, Kalimantan Utara sebagai provinsi baru di Indonesia yang di tetapkan pada tanggal 25 Oktober 2012 oleh DPR, yang menjadikan Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia dan berdiri sendiri, ketetapan ini di ambil oleh pemerintahan pusat agar provinsi yang baru ini dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di wilayah Kalimantan dan bertujuan agar angka migrasi dari desa ke kota di sekitar Kalimantan Utara menjadi menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pertumbuhan investasi di Kalimantan Utara setelah pemekaran wilayah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Utara. Metode dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur dengan pendekatan deskriptif dan data sekunder dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara. Dapat di simpulkan bahwa: (1) dengan adanya investor di Kalimantan Utara dan menjadikannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dapat menurunkan angka pengangguran, (2) Kebutuhan dari pembangunan itu sendiri mencakup perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang berdampak pada kemajuan dari pemerintahan dalam merencanakan kebijakan yang berpotensi memberantas kemiskinan.

Kata Kunci : Strategi, Peningkatan Investasi, Kalimantan Utara, Pemekaran Wilayah

PENDAHULUAN

Kalimantan Utara adalah provinsi yang belum lama di sahkan sebagai provinsi terbaru Indonesia yang ke 34 setelah terlepas dari provinsi Kalimantan Timur di mana pemekaran ini di maksud agar negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia tidak mengambil pulau-pulau yang ada di Kalimantan sebagai bagian dari milik mereka berdasarkan perkembangan otonomi daerah dari awal kemerdekaan hingga saat ini telah membentuk 542 daerah otonom yang terdiri atas 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Saat ini Kalimantan Utara merupakan provinsi

termuda Indonesia yang resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 (UU RI No. 20 Tahun 2012).

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum Pasal 4 ayat (3) undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004) menentukan bahwa pembentukan daerah otonomi dapat berupa penggabungan beberapa daerah yang bersanding/pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan daerah (selanjutnya disebut PP No. 78 Tahun 2007) menentukan bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Sedangkan undang-undang pemekaran terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan atau pemekaran wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”¹⁴ Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”.

Di mana provinsi ini baru berpisah dari Kalimantan Timur pada tahun 2012 dan berubah nama menjadi provinsi Kalimantan Utara, dan menjadikan provinsi termuda di Indonesia ini harus membenahi diri dan terlepas dari otonomi lama Kalimantan Timur dan memaksimalkan potensinya untuk pembangunan jangka panjang dan memperdayakan sumber daya yang ada dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Hal ini berdampak pada peningkatan mutu bagi wilayah Kalimantan Utara untuk bisa berdiri sendiri dan mengelola sumber daya yang ada di Kalimantan Utara agar dapat bersaing dengan wilayah lain dalam hal pembangunan wilayah yang berintegritas satu sama lain.

Penelitian ini mendalami hal yang menurut peneliti patut untuk digali lebih mendalam yaitu menganalisis pertumbuhan investasi di Kalimantan Utara setelah pemekaran 9 tahun dan dampaknya terhadap kemajuan pembangunan di provinsi Kalimantan Utara saat ini yang telah terpecah dan membagi wilayahnya menjadi 1 kota dan 4 kabupaten yang tersebar di 71.827 Km², hal ini yang mendominasi adalah perairan laut dengan perbatasan wilayah Malaysia di seberang wilayah pulau Sebatik.

Sejalan dengan itu pemerintah daerah Kalimantan Utara harus bisa membawa Kalimantan ke posisi yang bisa setara dengan provinsi yang sudah berdiri lebih dahulu dan memfokuskan kepada pembangunan wilayah, ekonomi yang merata, infrastruktur yang baik, rumah sakit atau tenaga kesehatan yang memadai dan pendidikan yang dapat di akses dari semua kabupaten atau kecamatan yang ada di Kalimantan Utara dikarenakan Kalimantan Utara mempunyai lima kabupaten/kota terdiri dari :

Tabel 1.
Nama Kabupaten Dan Kota Di Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Populasi (2017)	Ibu kota
1	Kota Tarakan	253.026	Tarakan
2	Kabupaten Nunukan	193.390	Nunukan
3	Kabupaten Bulungan	135.770	Tanjung Selor
4	Kabupaten Malinau	83.788	Kota Malinau
5	Kabupaten Tana Tidung	25.084	Tideng Pale

Sumber : wikipedia, 2020

Dengan berdirinya provinsi baru ini pemerintah pusat tidak hentinya mempromosikan Kalimantan Utara agar dapat membangun kotanya dengan baik sejalan dengan visi dan misi dari pemerintahan pusat mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia dan menstabilkan perekonomian pada wilayah yang sedang membangun. Hal inilah yang menjadikan pemerintahan daerah harus pintar menarik investor ke wilayah Kalimantan Utara dan membangun pusat bisnisnya di Kalimantan Utara agar dapat menurunkan angka migrasi dari provinsi yang kekurangan lapangan kerja ke provinsi yang sudah maju dalam segala aspek.

Dengan sejalannya Kalimantan Utara membangun dari segala aspek dan dapat memaksimalkan investasi untuk berkontribusi terhadap berjalannya perekonomian di kawasan Kalimantan terutamanya Kalimantan Utara yang belum genap 10 tahun berdiri dan menciptakan lapangan pekerja baru bagi 691.058 penduduknya yang ada di dalam provinsi Kalimantan Utara. Hal ini pula menjadikan masyarakat Kalimantan Utara harus bisa menyesuaikan diri dengan adanya regulasi yang selalu berubah di tingkat provinsi yang mengakibatkan selalu ada perubahan.

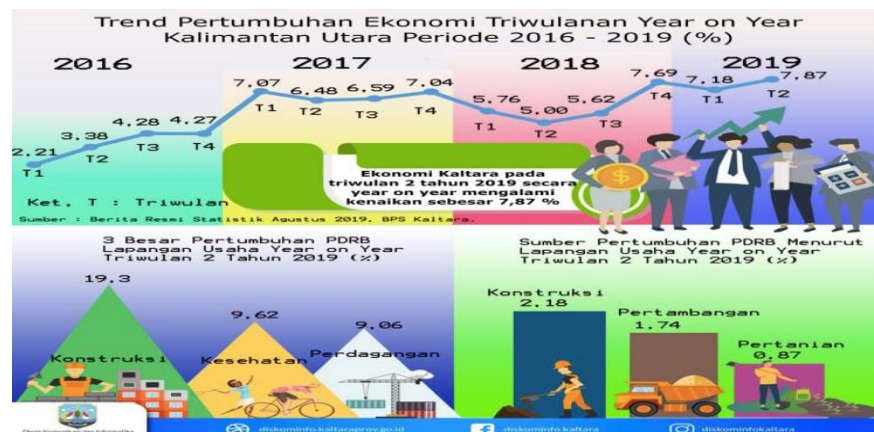
Tabel 2.
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha tahun 2019

Berdasarkan Lapangan Usaha	2017					2018					2019					
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	
	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	andl (%)	share (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.83	4.39	3.03	3.53	3.49	5.44	7.02	7.79	5.96	5.15	5.65	4.99	5.50	6.34	1.09	15.93
Pertambangan dan Penggalian	9.25	7.01	6.97	5.43	1.68	5.07	4.70	6.93	7.98	6.15	4.07	6.15	4.07	0.54	0.15	26.10
Industri Pengolahan	5.51	4.60	6.75	5.30	4.22	-1.56	0.12	4.13	4.01	6.68	4.71	6.68	4.71	4.04	0.38	9.30
Pengadaan Listrik, Gas	9.32	3.58	12.18	10.19	14.69	15.28	9.86	5.59	6.18	4.55	4.69	4.55	4.69	6.51	0.00	0.05
Pengadaan Air	6.87	6.94	6.31	8.90	6.88	9.53	7.75	4.99	4.94	2.15	2.21	2.15	2.21	2.23	0.00	0.06
Konstruksi	6.31	6.94	2.99	8.41	12.43	-0.28	5.66	12.76	5.38	19.48	12.15	19.30	12.15	11.95	1.52	14.34
Perdagangan Besar & Eceran	7.76	9.13	7.52	9.29	8.09	8.59	9.46	9.31	9.75	9.06	8.95	9.06	8.95	11.21	1.20	12.11
Transportasi dan Pergudangan	8.75	11.50	11.98	11.03	10.61	9.74	7.22	7.48	7.44	6.56	6.76	6.56	6.76	7.26	0.46	7.10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.24	11.04	14.43	16.95	15.77	14.33	9.36	8.99	8.36	7.39	7.44	7.39	7.44	8.53	0.12	1.61
Informasi dan Komunikasi	9.34	9.82	9.24	9.89	9.49	9.39	8.77	8.76	7.78	7.54	8.65	7.54	8.65	8.87	0.26	2.35
Jasa Keuangan	5.06	5.38	3.03	2.72	7.04	7.93	10.29	9.33	8.57	2.12	3.49	2.12	3.49	7.45	0.08	1.10
Real Estate	2.90	4.48	4.79	6.84	6.63	5.97	6.08	6.40	5.98	5.23	5.31	5.23	5.31	5.32	0.05	0.75
Jasa Perusahaan	0.44	3.89	4.47	5.30	5.07	3.63	3.43	3.11	2.18	2.46	2.29	2.46	2.29	2.32	0.01	0.21
Administrasi Pemerintahan	9.63	-0.28	8.48	9.73	9.31	9.42	3.84	2.49	9.82	4.73	5.68	4.73	5.68	6.77	0.35	4.94
Jasa Pendidikan	9.73	7.53	6.64	6.39	6.13	5.52	4.48	6.06	9.79	9.04	9.95	9.04	9.95	9.98	0.23	2.40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.64	6.14	5.29	5.27	4.94	3.79	4.07	8.12	9.56	9.62	8.55	9.62	8.55	8.61	0.09	1.02
Jasa lainnya	9.98	8.19	6.73	5.47	5.34	6.05	7.31	7.41	9.99	8.92	7.59	8.92	7.59	7.64	0.04	0.64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.06	6.48	6.61	7.05	5.82	5.03	5.64	7.65	7.21	7.91	6.56	7.87	6.53	6.04	6.04	100.00

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, 2019

Struktur perekonomian Kalimantan Utara 2019 didominasi oleh empat lapangan usaha utama. Keempat lapangan usaha utama tersebut, yaitu pertambangan (pangsa 26,10%), lapangan usaha pertanian (pangsa 15,93%), lapangan usaha konstruksi (pangsa 14,34%), dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (pangsa 12,11%). Secara akumulatif, keempat lapangan usaha tersebut menyumbang pangsa mencapai 68,48% terhadap perekonomian Kalimantan Utara tahun 2019.

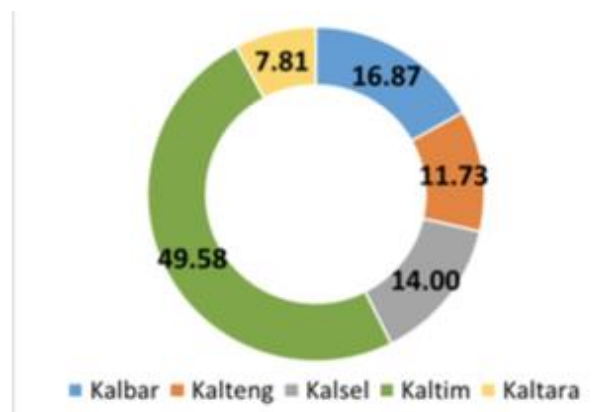


sumber: diskominfo.Kalimantan 2019

Gambar 1. Trend Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Utara

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada 2019 ini didukung oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan terbesar dicapai oleh Konstruksi sebesar 19,30 persen, kemudian diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,62 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 9,06 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 9,04 persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 9 persen.

Grafik 1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan



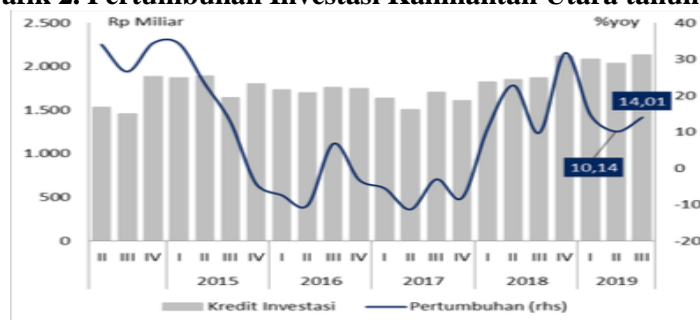
sumber : BPS, 2019

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa Berdasarkan strukturnya, pangsa ekonomi Kalimantan Utara (ADHB 2010) terhadap perekonomian Kalimantan pada tahun 2019 adalah sebesar 7,81%. Pangsa tersebut relatif sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,33%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan wilayah Kalimantan lainnya pangsa perekonomian Kalimantan Utara masih merupakan yang terkecil. Namun demikian, pangsa tersebut masih dalam tendensi naik dan harapannya dapat terus tumbuh tinggi dibandingkan provinsi lain di Kalimantan tiap tahunnya. Adapun pangsa ekonomi terbesar di wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Timur dengan pangsa yang mencapai 49,58%, disusul oleh Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan dan Kalimantan Tengah yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 16,87%, 14,00% dan 11,73% (grafik 2).

Berdasarkan lapangan usaha, perlambatan ekonomi Kalimantan Utara pada tahun 2019 disebabkan oleh melambatnya kinerja lapangan usaha utama, yakni pertambangan dan industri pengolahan ini mengakibatkan Kalimantan Utara masih dalam penyesuaian terhadap peningkatan sumber daya yang ada pada wilayah tersebut dan harus meningkatkan sektor investasi dalam bidang lainnya yang tidak di sebutkan di atas dan tidak terfokus terhadap lapangan usaha yang utama melainkan harus adanya lapangan usaha yang terintegritas terhadap wilayah perekonomian Kalimantan Utara yang saat ini sedang membangun wilayahnya.

Grafik 2. Pertumbuhan Investasi Kalimantan Utara tahun 2019



sumber : BKPM, 2019

Selanjutnya, meningkatnya kinerja investasi di Kalimantan Utara terkonfirmasi dari peningkatan kinerja investasi langsung dari dalam negeri. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pertumbuhan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Utara mengalami akselerasi sebesar 775,6% (yoy), tumbuh signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 74,5% (yoy) (Grafik I.25). Secara nominal, nilai investasi PMDN tercatat sebesar Rp1,3 triliun pada triwulan laporan. Melihat lebih dalam pada komponen PMDN, realisasi PMDN tertinggi berasal dari investasi pada sektor primer. Sektor perkebunan merupakan sektor penyumbang nilai PMDN terbesar. Hal ini sejalan dengan adanya pembangunan pabrik CPO dan pembelian mesin yang direalisasikan pada triwulan III 2019. Selain itu, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kalimantan Utara pada triwulan III 2019 juga turut mengalami akselerasi sebesar 75,1% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 42,1% (yoy).

Dari hasil kurva di atas dapat di artikan pertumbuhan investasi di Kalimantan Utara masih sangat melambat dan investasi yang mendominasi adalah investasi pada perkebunan yang di kelola langsung masyarakat Kalimantan Utara itu sendiri dan tidak sebanding dengan investasi luar negeri yang dapat mendorong perekonomian dan mendorong investasi wilayah Kalimantan Utara dan berdaya pada perkembangannya perusahaan modal asing di Kalimantan Utara dan menciptakan lapangan kerja baru masyarakatnya.

KAJIAN PUSTAKA

Yang melakukan penelitian di Pulau Sebatik, yang menunjukkan bahwa pemekaran ialah sebuah kebutuhan masyarakat, bukanlah sebuah keinginan. Jika kita geser proses politiknya ini akan menjadi sebuah 'kebutuhan' maka 'turunannya' akan berbeda pula, seperti kebutuhan untuk 'mendekatkan' wakil pusat di daerah melalui kepala daerah agar

setiap kebutuhan dan keluhan masyarakat terlihat lebih jelas. Kedua, dengan adanya wakil pusat di daerah lebih dekat pemerintah dapat fokus memperhatikan dan menjaga wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. (Febriyandi 2015)

Pemekaran daerah tidak berimplikasi pada perbaikan daerah, sebagaimana penelitian (Sjaf 2014) menunjukkan hasil bahwa dinamika pemekaran daerah di Indonesia menunjukkan gejala yang negatif, politik dari masa ke masa yang menunjukkan adanya gejala negatif dari suatu pemekaran daerah. Semakin bertambahnya jumlah wilayah hasil pemekaran daerah tidak serta merta membuat suatu perubahan besar bagi kesejahteraan dan kemudahan akses politik warga negara.

Permasalahan yang terjadi pada pemekaran daerah merupakan suatu dinamika kebangsaan yang wajar dan hal itu menunjukkan adanya perbaikan daripada sistem di masa orde baru. Pemekaran pasca reformasi memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman, dan otonomi lokal, sesuatu yang dulu diabaikan pada era Orde Baru. Namun di lain pihak, fenomena pemekaran wilayah secara besar-besaran tersebut sekaligus membawa masalah-masalah baru. Setiap pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah, batas dan nama wilayah, pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada daerah asal. (Muqoyyidin 2013)

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan per kapita serta produktivitas per kapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. (Subandi: 2011:13)

Dapat dikatakan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi ialah alat untuk menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi akan tidak tampak jelas memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno 2013:423). Responsif terhadap kebutuhan eksternal merupakan praktik perencanaan yang banyak dianut oleh pemerintahan baik daerah maupun pusat di mana dari dua jenis prespektif pembangunan daerah tersebut bermuara pada tahap tipologi empat orientasi perencanaan yang berbeda, yaitu dua model yang sudah umum diterapkan (*recruitment planning* dan *impact planning*) dan dua model lagi yang baru (perencanaan kontingensi dan perencanaan strategi) bagi perekonomian daerah (Kuncoro, 2018)

Dua alasan pokok kegagalan pemerintah: (1) kekurangan informasi; (2) pengalihan kekuatan pemerintah dari mencapai kesejahteraan umum menjadi memajukan kesejahteraan sejumlah individu. Alasan pertama adalah pemerintah kurang berkoordinasi terhadap pemerintahan pusat ataupun terhadap petinggi-petinggi yang ada di dalam struktur pemerintahan ataupun pemerintahan sering melakukan sesuatu ketika tidak memiliki cukup informasi untuk mengambil keputusan terbaik. Alasan kedua kegagalan

pemerintah adalah bahwa aktivitas ekonomi memang tidak bisa hanya bersandar kepada peran pemerintah, peran mekanisme pasar juga diperlukan demi berjalannya aktivitas ekonomi di daerah tersebut. North menyatakan hal tersebut dengan: “ *if you want to realize the potential of modern technology, you cannot do whit the state, but you cannot do wihtbout it either*” (Van den Berg, 2005:448).

Menurut (Kuncoro 2012) Setidaknya ada tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah:

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interkasi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya, administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogianya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya-sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencanaan dengan objek perencanaan.

Menurut (Syahyuti 2009) empat cara membedakan kelembagaan dengan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan adalah tradisional, organisasi modern.
2. Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri, organisasi datang dari atas.
3. Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu komando. Organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga. Yang sempurna adalah organisasi yang melembaga.
4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Organisasi sebagai organ kelembagaan.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur pustaka dengan pendekatan deskriptif dan data sekunder dari BPS (Biro Pusat Statistik) Kalimantan Utara dan pengalam penulis bertempat tinggal di Kalimantan Utara selama 20 tahun sebelum dan sesudah pemekaran Kalimantan Utara serta data-data sebagai pendamping sekaligus juga pendukung fenomena yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya penambahan investasi dan pertumbuhan lapangan pekerja yang baru di Kalimantan Utara dapat berdampak positif terhadap sektor lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara yang dalam posisi yang tidak terlalu stabil/melonjak tajam di akibatkan karena Kalimantan Utara masih berstatus provinsi baru di Indonesia dan potensi dari Kalimantan Utara masih sedikit yang dapat dikembangkan, pertambangan dan sektor pertanian dalam hal ini diperlukan pakar

peneliti lapangan yang memberitahukan potensi yang dapat di kembangkan di Kalimantan Utara selain empat sektor utama yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan rilis data ketenagakerjaan Agustus 2019 oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,22% menjadi 4,40%. Penurunan TPT disumbang oleh adanya pertumbuhan jumlah penduduk bekerja di tengah jumlah penduduk berumur di atas 15 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah pengangguran di Kalimantan utara mengalami penurunan hingga 13,58 persen atau 2.417 jiwa. Disisi lain, jumlah angkatan kerja yang bekerja meningkat 3,21 persen atau 10.377 jiwa. Jumlah angkatan kerja Kalimantan utara pada Agustus 2019 tercatat 349,1 ribu jiwa, meningkat 2,33% (yoy) atau terjadi penambahan sebesar 7.960 ribu jiwa (Tabel 1.3). Tingkat Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja (TPAK) berdasarkan rilis ketenagakerjaan menurun dari 67,81% pada Agustus 2018 menjadi 66,28% pada Agustus 2019.

Tabel 4.
Ketenagakerjaan Kalimantan Utara dari tahun 2018 hingga 2019

Kondisi Ketenagakerjaan	2018	2019	pertumbuhan	
	Ags	Ags	Orang	%
Jumlah Penduduk 15+	503.147	526.823	23.767	4,71
Jumlah Angka Kerja	341.197	349.157	7.960	2,33
Jumlah Bekerja	323.400	333.777	10.377	3,21
Jumlah Pengangguran	17.797	15.380	(2.417)	-13,58
Bukan Angka Kerja	161.950	177.666	15.716	9,70
Tingkat Partisipasi Angka Kerja (%)	67,81	66,28		
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,22	4,40		

sumber : BPS, 2019

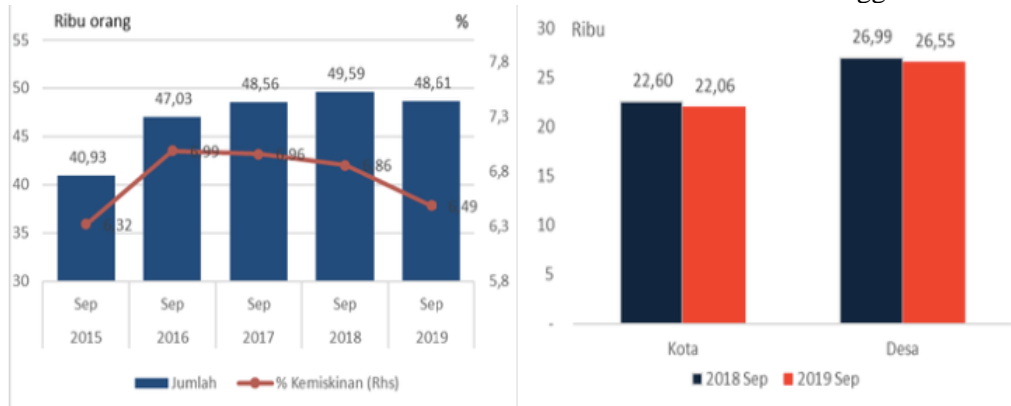
Selain itu aspek-aspek yang harus dibenahi dalam menunjang perekonomian dan pengembangan investasi di Kalimantan Utara seperti perbaikan infrastruktur terutama jalan-jalan yang strategis, kesehatan di desa-desa, pendidikan yang akan berdampak positif terhadap berkembangnya ekonomi dan investasi di Kalimantan Utara ini memberikan celah untuk investor berpikir bahwa Kalimantan Utara sudah dapat memberikan SDM yang bermutu dikarenakan faktor pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik di desa-desa dan infrastruktur yang sangat menunjang untuk pembangunan lapangan kerja yang baru di tingkat kota ataupun di tingkat kecamatan di Kalimantan Utara.

Namun hal yang terpenting dari pembangunan ekonomi dan investasi di Kalimantan Utara adalah dari struktur pemerintahan jika pemerintahannya tidak pro terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi di Kalimantan Utara, maka akan sama saja meruntuhkan semua aspek di dalam Kalimantan Utara ini mengakibatkan provinsi yang sudah terpisah dari Kalimantan Timur tidak akan tubuh dan berkembang sejalan dengan program pemerintahan pusat, maksud dari pemekaran Kalimantan Utara adalah agar bisa menunjukan potensinya dan tidak lagi bergantung pada provinsi Kalimantan Timur yang saat ini sedang membangun wilayahnya juga.

Adapun jumlah penduduk miskin Kalimantan Utara pada September 2019 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada 2018. Berdasarkan data

kemiskinan BPS pada September 2019, persentase penduduk miskin di Kalimantan Utara turun sebesar 2 persen menjadi 48,61 ribu dari 49,59 ribu jiwa atau sebanyak 980 orang. Tren penurunan jumlah penduduk miskin Kalimantan Utara ini terjadi setelah terus meningkat sejak 2015 dalam periode yang sama. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara ini disebabkan oleh turunnya jumlah penduduk miskin di daerah kota sebanyak 540 orang.

Grafik 3. Jumlah Kemiskinan di Kalimantan Utara Tahun 2015 hingga 2019



sumber : BPS, 2019

Di sisi lain, garis kemiskinan masih mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Dengan begitu, turunnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan pengeluaran per kapita masyarakat mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan yang juga dapat diartikan sebagai kesejahteraan yang semakin meningkat.

PENUTUP

Dari hasil penelitian di atas penulis dapat simpulkan bahwa peran investasi dalam pembangunan suatu wilayah seperti Kalimantan Utara dapat mendorong pembangunan ekonomi suatu wilayah tak terkecuali Kalimantan Utara yang mengakibatkan angka kemiskinan dan pengangguran pada wilayah tersebut berangsur-angsur membaik dan menaikkan taraf ekonomi masyarakat Kalimantan Utara, sehingga dengan adanya investor membangun perusahaannya di Kalimantan Utara dan menjadikannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Kalimantan Utara dan tidak lagi bergantung pada perusahaan di luar wilayah Kalimantan Utara. Hal inilah yang akan mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di pelosok-pelosok Kalimantan Utara dan berimbas terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.

Dengan banyaknya investor yang membangun perusahaannya di Kalimantan Utara dapat meningkatkan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran dan memaksimalkan potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kalimantan Utara. Kebutuhan dalam percepatan ekonomi dapat mengakibatkan menaikkan taraf ekonomi dari masyarakat di pelosok Kalimantan Utara, dan menurunkan angka ketergantungan masyarakat Kalimantan Utara terhadap wilayah di luar Kalimantan Utara seperti ke negara Malaysia mencari pekerjaan dan dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang ada tanpa harus bekerja dan mencari kebutuhan hidup di wilayah lain.

Kebutuhan dari pembangunan itu sendiri mencakup perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang berdampak pada kemajuan dari pemerintahan dalam merencanakan kebijakan yang berpotensi memberantas kemiskinan, ketergantungan pada wilayah lain, dan menyelamatkan masyarakatnya dari ketergantungan pada negara tetangga Kalimantan Utara yaitu Malaysia.

Namun menurut penulis, dukungan dari pemerintahan pusat dalam hal pembangunan wilayah dan mendorong investasi ke Kalimantan Utara masih sangat kurang di lihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang masih terbilang sangat tinggi dari provinsi Kalimantan Utara di bandingkan provinsi lainnya. Hal ini harus dapat diantisipasi karena Kalimantan Utara mempunyai banyak potensi baik alam maupun sumber daya lainnya yang ada di Kalimantan Utara jika tidak di kelola oleh tenaga ahli ataupun investor yang di bidangnya akan mengakibatkan kerugian bagi wilayah Kalimantan Utara itu sendiri dan tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyanidi, D. (2015). Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara). *Jurnal Politik Propektif*, 3(3).
- Kuncoro, Mudrajad. 2018, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2012, *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, kota, dan Kawasan?* Jakarta: Salemba Empat.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287-310.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjaf. (2014). Dinamika Lokal di Kendari. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Syahyuti. (2009). Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih Operasional, (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 2009) dalam www.kelembagaandas.wordpress.com/pengertian-kelembagaan/syahyuti, (11 april 2020).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.
- Van den Berg, Hendrik. 2005, *Economic Growth and Development: An Analysing of Our Greatest Economic Achievement and Our Most Exciting Challenges*. Singapore: McGraw-Hill.